PROF PURWO SANTOSO

Isu Dinasti Politik Bersumber dari Paham Demokrasi Liberal

SLEMAN (KR) - Isu dinasti politik di Indonesia mulai mengemuka beberapa tahun terakhir terutama sejak bergulirnya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Di masa lalu, isu tersebut tidak pernah santer terdengar atau bahkan sampai menjadi perbincangan publik. Hal ini ditengarai oleh Prof. Purwo Santoso sebagai akibat perkembangan generasi yang terlalu serius belajar paham demokrasi liberal.

Prof Purwo Santoso menilai, dalam proses pergantian kepemimpinan maupun sebuah jabatan dengan melibatkan orang terdekat sudah ada pada masa lalu, atau yang lebih dikenal sebagai politik kekerabatan. Namun sistem tersebut tidak pernah mendapatkan kritikan atau bahkan menjadi asumsi publik seperti dalam era demokrasi saat ini yang dikenal sebagai dinasti politik.

"Mengapa di masa lalu tidak ada olok-olok politik dinasti, padahal konsep itu sudah ada sejak jaman dahulu dengan nama politik kekerabatan. Yang ditunjukkan sikap pemilih dengan mempertimbangkan bibit, bobot dan bebet ketika memilih pemimpin. Secara substantif, itu

KR-Istimewa

Prof Purwo Santoso

sama dengan politik dinasti," ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Mengapa demokrasi liberal, Prof Purwo Santoso menerangkan, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya kebebasan berjuang yang dijamin sebagai hak. Desain tersebut sudah mengakar, namun tidak pernah diakui oleh pelaku atau bahkan pakar politik itu sendiri.

Liberty individualitas saat ini dijamin oleh undang-undang, dan kemudian semua orang secara hukum berhak untuk berjuang hidup. Dalam konteks Pilkada, menggunakan segala sumber daya apapun yang tersedia termasuk kekerabatan, hal itu diperbolehkan lantaran tidak ada larangan hukumnya.

"Pertaruhannya tinggal masyarakat itu tertarik memilih atau tidak. Kalau memang yang terlibat itu orang-orang yang mempunyai kebaikan di masa lalu dan kebaikannya terkonfirmasi, kalau orang kemudian bersimpati memilih tidak ada salahnya secara hukum," jelasnya.

Ditegaskan guru besar Fisipol UGM, sistem demokrasi itu sendiri bukan untuk memikat hak, melainkan untuk memperjuangkan hak. Konsekuensi demokrasi dalam bahasanya adalah untuk melampiaskan hak dan kemudian tinggal akal sehat publik yang menilai dan menentukan. Pasalnya dalam demokrasi ini, rakyat adalah objek yang memiliki pilihan untuk secara sadar memilih, atau justru tidak memilih karena terpengaruh.

"Dan kalau gamenya adalah rebutan suara dan semua orang mencari cara terbaik untuk menang. Ya itu game demokrasi liberal yang sudah disetting begitu. Yang saya salahkan adalah game demokrasinya, bukan orang yang memanfaatkan atau dijamin secara hukumnya. Dan ini terjadi di semua wilayah yang ada di Indonesia," tegasnya.

(Sni)-f

DIPA 2021 Diserahkan DIY Terima Rp 12,28 T

YOGYA (KR) - APBN tahun 2021 menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Seperti mendukung kelanjutan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya. Karena itulah, pada APBN tahun 2021 mendatang, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, pemerintah telah menentukan empat fokus kebijakan. Pertama, penanganan kesehatan yang menitikberatkan pada vaksinasi Covid-19.

"Kedua adalah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu. Sedangkan ketiga adalah kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan lebih besar bagi perkembangan dunia usaha. Fokus kebijakan keempat, membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Penyerahan DIPA APBN 2021 dengan tema 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi' di Bangsal Kepatihan Selasa (1/12)

Menurut Sultan, tahun 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian termasuk kondisi ekonomi global. Karenanya, kecepatan dan ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan pemerintah yang harus berhadapan dengan tantangan pandemi Covid-19.

Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY Sahat MT Panggabean menyampaikan, alokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 di wilayah DIY sebesar Rp 12,28 triliun dengan jumlah DIPA sebanyak 353. Yang terdiri atas 307 DIPA untuk instansi vertikal dengan nilai sebesar Rp12,14 triliun dan 46 DIPA dengan nilai sebesar Rp 141,84 miliar untuk berbagai SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. **(Ria/Ira)-f**

DUKUNG PILKADA JURDIL-LUBER

GP Ansor Tolak 'Money Politics' dan Penyalahgunaan Bansos

SLEMAN (KR) - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Se-Kabupaten Sleman akan mendukung pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sleman langsung, bebas, rahasia, jujur, adil (Luber-Jurdil). Selain itu, secara tegas GP Ansor juga menolak dan mengawasi praktik-praktik 'money politics' dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.

Ketua GP Ansor Kabupaten Sleman Ariyanto Nugroho menyatakan, setelah dilaksanakan Apel Kebangsaan pada Minggu (29/11) lalu, secara serempak Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kapanewon (Kecamatan) se-Kabupaten Sleman menemui Penewu di wilayahnya masing-masing. Pertemuan itu untuk menyatakan sikap terkait perkembangan situasi yang ada di Kabupaten Sleman menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020.

"Kami mendukung Pilkada di Sleman Luber-Jurdil, serta profesional, objektif dan transparan. Kami berkomitmen untuk dapat turut serta menjaga masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat hari H," kata Ariyanto, Selasa (1/12).

Dalam setiap pertemuan dengan Penewu, GP Ansor secara tegas menolak dan akan mengawasi praktik-praktik ëmoney politicsí, intimidasi, serta segala jenis kecurangan yang mungkin dilakukan oleh semua pihak. Selain itu juga menolak penyalahgunaan pemberian bansos seperti PKH, bansos, BKK, BLT, PIP dan lainnya untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.

KR-Istimewa

PAC GP Ansor saat silaturahmi dengan salah satu Penewu di Kabupaten Sleman.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, terdapat beberapa hal yang tidak etis pada saat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Ada informasi, penerima bantuan sosial yang digiring untuk memilih paslon tertentu. Bahkan diancam dihentikan bansosnya kalau tidak memilih," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh lurah, dukuh, RW, RT untuk bersikap netral. Hal itu menjaga situasi kondusif baik sebelum, pada saat, maupun pasca Pilkada 9 Desember 2020. "Kami ingin Penewu, lurah hingga tingkat RT/RW harus netral. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan paslon," tegasnya. **(Sni)-f**